

Pemakzulan Gusdur dan Respon Kalangan Ulama dan Santri di Pesantren Sabilurrosyad Gasek Malang Tahun 2001

Alif Rifqi Harwinsyah

Universitas Negeri Malang, Indonesia
alif.rifqi.2107316@students.um.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas dinamika politik awal reformasi, khususnya terkait latar belakang pemakzulan Gus Dur dan respon kalangan santri serta ulama di Pesantren Sabilurrosyad Gasek Malang terhadap peristiwa tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami sikap dan tindakan santri serta ulama dalam menanggapi pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2001. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan memanfaatkan sumber sejarah primer melalui wawancara dengan para saksi hidup di pesantren, serta sumber sekunder dari buku dan artikel jurnal. Pendekatan penelitian sejarah diterapkan dalam lima tahapan: pemilihan topik, pengumpulan sumber, pengecekan keabsahan sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon dari para santri dan ulama di Pesantren Sabilurrosyad Gasek sangat menentang pemakzulan Gus Dur. Mereka melakukan perlawanan diplomatis dan simbolis, mencerminkan solidaritas dan komitmen terhadap nilai-nilai yang diusung oleh Gus Dur. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa peristiwa pemakzulan tidak hanya mempengaruhi dinamika politik nasional, tetapi juga membangkitkan kesadaran kolektif di kalangan santri dan ulama untuk mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

Kata kunci: gus dur; reformasi; sabilurrosyad gasek.

Abstract

This research discusses the political dynamics of the beginning of reform, especially regarding the background to Gus Dur's impeachment and the response of santri and ulama at the Sabilurrosyad Gasek Islamic Boarding School in Malang to this event. The aim of this research is to understand the attitudes and actions of santri and ulama in responding to the impeachment of President Abdurrahman Wahid in 2001. The method used is qualitative descriptive, utilizing primary historical sources through interviews with witnesses living in Islamic boarding schools, as well as secondary sources from books and articles journal. The historical research approach is applied in five stages: topic selection, source collection, checking the validity of sources, interpretation, and historiography. The results of the research show that the response from the students and ulama at the Sabilurrosyad Gasek Islamic Boarding School was strongly against the impeachment of Gus Dur. They carried out diplomatic and symbolic resistance, reflecting solidarity and commitment to the values promoted by Gus Dur. The conclusion of this research confirms that the impeachment incident not only influenced national political dynamics, but also raised collective awareness among Islamic students and ulama to defend the principles of democracy and justice.

Keywords: gus dur; reformasi; sabilurrosyad gasek

*Correspondence Author: Alif Rifqi Harwinsyah
Email: alif.rifqi.2107316@students.um.ac.id



PENDAHULUAN

Lengsernya sebuah kekuasaan atau rezim telah menjadi sebuah bagian dari sejarah dinamika perkembangan politik (Arifin, 2022; Kashwan et al., 2019). Seorang pemimpin akan dilengserkan ketika sudah tidak mampu dalam melakukan tugasnya sebagai kepala negara. Atau dalam kata lain pemimpin yang melakukan penyelewengan kekuasaan. Penggulingan Louis XVI dalam Revolusi Perancis diakibatkan oleh kegagalannya dalam memimpin (Swantoro, 2016). Peristiwa ini mengakibatkan sebuah perubahan mendasar

tentang struktur pemerintahan dan ideologi negara Perancis serta mempengaruhi wilayah di luar Perancis dengan gerakan revolusi (Doyle, 2018).

Di era demokrasi, pelengseran kekuasaan seperti upaya pemakzulan dapat menjadi sebuah upaya dalam menjaga demokrasi dari upaya kekuasaan yang otoriter (Tokatli, 2024). Konsep pemakzulan atau impeachment pertama kali dikenalkan dalam konstitusi federal Inggris untuk mengontrol dan membatasi kekuasaan raja yang bertindak semena-mena (Sujatnika et al., 2024). Proses pemakzulan di Indonesia telah tercatat dalam UUD 1945 pasal 7a yang menguraikan tentang pelanggaran apa saja yang dapat menyebabkan pemakzulan presiden dan wakil presiden dari jabatannya, serta UUD 1945 pasal 7b yang menguraikan tentang prosedur tata cara pemakzulan presiden dan wakil presiden (Ayuningtiyas et al., 2023).

Sejarah dinamika politik Indonesia telah mencatat setidaknya ada dua kali pelengseran presiden sebelum era reformasi dengan dua proses berbeda, pemakzulan dan pengunduran diri (Ahmad Muthohar, n.d.; Barnard & Luiz, 2018; Christensen et al., 2024). Pelengseran Soekarno berlangsung dengan proses pemakzulan yang dilakukan oleh MPRS dengan ditolaknya pidato pertanggungjawaban Nawaksara terkait dengan peristiwa G30S oleh MPRS (Yulianto & Amalia, 2024). Pemakzulan Soekarno juga dilatarbelakangi oleh persoalan demokrasi terpimpin yang cenderung pada gaya kepemimpinan otoriter (Suyono & Sunaryo, 2024). Pengunduran diri Soeharto dilatarbelakangi oleh krisis moneter serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang parah (Saly et al., 2023). Pelengseran kedua pemimpin Indonesia telah melengkapi sejarah dinamika politik di Indonesia.

Pada era reformasi, pelengseran terjadi Kembali melalui proses pemakzulan yang dilakukan oleh MPR untuk menurunkan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dari kekuasaannya. Pemakzulan Gus Dur dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan seperti dugaan kasus Bulog gate dan Brunei gate yang menjerat Gus Dur (Sari et al., 2023). Latar belakang Gus Dur yang berasal dari kalangan Nahdatul Ulama turut menimbulkan reaksi penolakan dari kalangan Islam khususnya dalam lingkup Nahdatul Ulama. Salah satu yang cukup vokal dari penolakan terhadap pemakzulan Gus Dur adalah kelompok ulama dan santri.

Arifin (2022) menjelaskan bahwa terdapat sebuah penolakan yang datang dari kalangan santri terhadap pemakzulan Gus Dur, muncul sebuah gerakan berani mati yang apabila Gus Dur dilengserkan dan gerakan ini diprakarsai oleh mayoritas santri dan ulama dari kalangan Nahdatul Ulama (Ansharullah, 2020; Khasanah, n.d.). Kehadiran santri dalam pemakzulan Gus Dur merupakan sebuah efek dari pergolakan politik yang memunculkan sebuah reaksi berupa penolakan dan demonstrasi. Hal tersebut dipertegas oleh Nofiaturrehman (2014) tentang adanya gerakan demonstrasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang dilakukan oleh kalangan warga Nahdatul Ulama yang menyasar pada kantor-kantor partai Golkar serta gedung-gedung pemerintahan, selain itu juga para demonstran mengancam akan pergi ke Jakarta untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran dengan tuntutan agar Gus Dur tidak dimakzulkan dan tetap pada jabatannya sebagai sebagai presiden RI.

Dengan demikian, penelitian ini akan berfokus pada respon para santri dan ulama di Pesantren Sabilurrosyad Gasek Malang, yang menjadi saksi ketika peristiwa pelengseran Abdurrahman Wahid pada tahun 2001. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: "Bagaimana pengaruh penolakan dari kalangan santri dan ulama terhadap proses pemakzulan Gus Dur di Pesantren Sabilurrosyad Gasek Malang" Dengan demikian, penelitian ini akan menggali lebih dalam tentang respon serta tindakan yang diambil oleh kalangan santri dan ulama terhadap pemakzulan Gus Dur dari kursi kepresidenan.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metodologi penelitian penulisan sejarah dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif, berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial yang terjadi pada era pemakzulan Gus Dur. Populasi dalam penelitian ini adalah para ulama dan santri di Pesantren Sabilurrosyad Gasek Malang, dengan sampel yang diambil melalui teknik purposive sampling, yaitu dengan memilih informan yang dianggap memiliki informasi relevan sebagai saksi sejarah. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, serta pengumpulan sumber sekunder berupa jurnal, artikel, dan buku. Analisis data dilakukan dengan mengikuti lima tahapan penelitian sejarah yang terdiri dari pemilihan topik, heuristic, verifikasi, interpretasi, dan historiografi (Bakri & Naj'ma, 2020; Nadirah et al., 2022). Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai alat utama dalam mengamati keadaan objek alami, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai respon Pesantren Sabilurrosyad terhadap pemakzulan Gus Dur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan terhadap berbagai kebijakan Gus Dur yang kontroversial seperti permohonan maaf kepada PKI dan wacana penghapusan tap MPRS nomor XXV tahun 1966, normalisasi hubungan Indonesia-Israel, serta gaya Gus Dur yang cenderung pluralis menyebabkan dirinya bermusuhan bagi sebagian kalangan Islam konservatif. Hal inilah yang menimbulkan banyaknya kalangan yang menentang Gus Dur. Persaingan politik kala Gus Dur menjabat juga menjadi menyebabkan pada pelengseran dirinya, di masa pemerintahannya telah terbagi menjadi dua kubu pertentangan antara lembaga kepresidenan dan MPR yang mana. Gus Dur yang membawa lembaga kepresidenan harus bertentangan dengan Amin Rais yang membawa nama MPR (Arifin, 2022).

Pertentangan Gus Dur dan Amin Rais bukanlah tanpa sebab, perbedaan pemikiran serta pandangan politik menyebabkan keduanya saling bersitegang melalui politik (Naufal, 2017; Putera, 2018). Keduanya merupakan politikus yang membawa gerbong besar, Gus Dur dengan Nahdatul Ulama dan Amin Rais dengan Muhammadiyah. Meskipun Muhammadiyah netral dan tidak berurusan dengan politik namun tetap membiarkan anggotanya bebas untuk bersikap dalam politik (Hadisaputra, 2021). Perbedaan dari keduanya juga terlihat dari pandangannya mengenai hubungan Islam dan negara, Gus Dur memiliki pandangan yang lebih plural dan memandang unsur humanisme serta kesetaraan keyakinan, sedangkan Amin Rais lebih menganggap Islam adalah aspek penting dari negara dan tidak dapat dipisahkan. Pelengseran Gus Dur menciptakan tendensi antara kalangan Nahdatul Ulama dengan Amin Rais yang kala itu menduduki jabatan sebagai ketua MPR. Hal ini dijelaskan dalam penuturan Ali Mahsun, salah seorang alumni santri dari Pesantren Sabilurrosyad yang kala itu mengalami dan melihat jalannya proses pemakzulan Gus Dur dari kursi kekuasaannya, Ali menjelaskan bahwa Amin Rais merupakan kunci dari pemakzulan Gus Dur.

Ali Mahsun juga menuturkan mengenai kondisi yang terjadi kala pemakzulan Gus Dur pada 2001 di Pesantren Sabilurrosyad, gerakan penolakan yang terjadi di Pesantren Sabilurrosyad berupa kegiatan istigosah dan doa bersama yang dilakukan oleh seluruh kalangan santri putra dan putri beserta para kyai termasuk KH Marzuqi Mustamar yang merupakan pengasuh dari Pesantren Sabilurrosyad. Ali menjelaskan terkait dengan konsolidasi dengan pengurus Nahdatul Ulama bahwa gerakan penolakan tidak boleh

menimbulkan kekacauan dan kegaduhan di masyarakat umum serta harus dilakukan dengan menjaga nama baik seorang santri. Hal ini disebabkan oleh perintah langsung dari Gus Dur yang kala itu melarang para warga Nahdatul Ulama untuk membuat aksi-aksi yang dapat menimbulkan pertumpahan darah dan kerusakan. Ali menuturkan meskipun terdapat himbauan yang langsung dituturkan kepada Gus Dur melalui pengurus Nahdatul Ulama mengenai larangan turun ke jalan hal ini tetap menimbulkan kemarahan dari sebagian kalangan santri kala itu, menurutnya semua santri di Sabilurrosyad saat itu merasa tidak puas dan sangat kecewa terhadap keputusan pemakzulan Gus Dur, bahkan dirinya menyampaikan bahwa apabila diizinkan untuk turun ke jalan maka para santri dari Pesantren Sabilurrosyad siap untuk diberangkatkan ke Jakarta untuk berdemonstrasi.

Sosok Gus Dur diungkapkan oleh Ali sebagai seorang role model bagi semua santri termasuk para santri dan santriwati di Pesantren Sabilurrosyad, pemikiran Gus Dur mengenai spiritualitas dan ilmu-ilmunya merupakan tuntunan yang diikuti oleh banyak kalangan santri, selain itu juga sosoknya yang sangat jenaka sangat disukai banyak santri. Maka dari itu tidak heran apabila banyak santri yang membela mati-matian terhadap Gus Dur khususnya ketika pemakzulan terhadapnya dilakukan oleh parlemen. Buah pemikiran Gus Dur hingga saat ini masih dipertahankan sebagai tuntunan dan acuan bagi para santri khususnya di Pesantren Sabilurrosyad, hal ini dituturkan oleh Ali bahwa semua santri dan santriwati menganggap bahwa pelengseran Gus Dur adalah sebuah permainan politik dan Gus Dur adalah seorang korban dari kelicikan politik kala itu. Peran Gus Dur sebagai role model di Pesantren dituturkan oleh Rizki yang saat ini merupakan seorang santri di Pesantren Sabilurrosyad dan juga seorang mahasiswa pendidikan sejarah, menurutnya sosok Gus Dur merupakan sosok yang plural dan memahami akan persoalan bangsa, pemakzulan terhadap Gus Dur menurut Rizki adalah sebuah kepentingan politik belaka dan tidak sesuai dengan konstitusi.

Pada akhirnya Gus Dur terpaksa dilengserkan melalui pemakzulan yang tidak dilandasi oleh konstitusi karena hanya mengandalkan Tap MPR No III tahun 1978 dan tidak menggunakan UUD 1945. Gus Dur dimakzulkan dengan motif politik yang kuat dan bukan melalui proses konstitusional. Motif politik dalam pemakzulan Gus Dur dilatarbelakangi oleh banyak hal seperti salah satunya disebabkan oleh pemecatan berbagai pejabat (Yola, 2021). Jusuf Kalla yang kala itu menjabat sebagai menteri perindustrian dan perdagangan dari partai Golkar serta Laksamana Sukardi sebagai menteri BUMN dari partai PDIP dipecat oleh Gus Dur dan menyebabkan kedua partai ini bersatu dan melalui parlemen mereka membentuk sebuah perlawanan salah satunya dengan menciptakan panitia khusus penanganan kasus Buloggate dan Bruneigate yang menganggap bahwa Gus Dur terlibat dalam penyelewengan dana (Utama, 2021).

Menurut penuturan Ali saat ini terdapat upaya untuk mengembalikan nama baik Gus Dur yang diusahakan oleh para pengurus Nahdatul Ulama atas tuduhannya terkait dengan kasus Bruneigate dan Buloggate yang mencatut nama Gus Dur. Ali berharap di era kepemimpinan Prabowo saat ini dapat mengembalikan nama baik Gus Dur karena menurutnya Prabowo merupakan orang yang dekat dengan Gus Dur khususnya di era awal-awal reformasi.

KESIMPULAN

Pemakzulan Gus Dur dari kursi kepresidenan menimbulkan reaksi penolakan dari kalangan santri khususnya di Pesantren Sabilurrosyad Gasek yang ditunjukkan dengan kegiatan doa bersama sebagai bentuk perlawanan terhadap pemakzulan Gus Dur. Selain itu peristiwa ini telah menimbulkan sebuah perpecahan politik antara kalangan Nahdatul Ulama dengan sebagian besar kalangan islam yang lebih konservatif khususnya bagi para pendukung Amin Rais kala itu. Pemakzulan Gus Dur merupakan salah satu dinamika politik Indonesia. Implikasi praktis dari temuan penelitian ini adalah pentingnya memahami bagaimana reaksi komunitas terhadap perubahan politik dapat memengaruhi stabilitas sosial. Pihak-pihak terkait, seperti organisasi keagamaan dan partai politik, dapat memanfaatkan temuan ini untuk meningkatkan komunikasi dan dialog antar kelompok, guna mencegah konflik di masa depan. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh para pemimpin dan pengambil kebijakan untuk lebih peka terhadap sentimen masyarakat, terutama dalam konteks pergeseran politik yang sensitif. Dengan memahami konteks sejarah dan dinamika yang terjadi, diharapkan upaya-upaya rekonsiliasi dan penguatan demokrasi dapat dilakukan secara lebih efektif.

BIBLIOGRAFI

- Ahmad Muthohar, A. R. (n.d.). *Relasi Media Massa Dan Politik Studi Peran Televisi dalam Dinamika Politik di Indonesia*.
- Ansharullah, H. (2020). *Assalamu'alaikum Gus Dur: Sang Guru Bangsa yang Humoris*. Penerbit Universitas Ciputra.
- Arifin, I. (2022). Agama dalam pelaksanaan dan kemenangan pemilu pilpres, sebagai sebuah realitas politik di Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(4), 1049–1057. <https://doi.org/10.29210/020221706>
- Ayuningtiyas, F., Khusnah, A., & Wahyuningtyas, A. (2023). Efektivitas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terhadap Mekanisme Checks and Balances dan Pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 4(2), 99–111. <https://doi.org/10.18196/jphk.v4i2.17556>
- Bakri, S., & Naj'ma, D. B. A. (2020). *Membangun Metodologi Penelitian Sejarah Untuk Pengembangan Islamic Studies*.
- Barnard, H., & Luiz, J. M. (2018). Escape FDI and the dynamics of a cumulative process of institutional misalignment and contestation: Stress, strain and failure. *Journal of World Business*, 53(5), 605–619. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2018.03.010>
- Christensen, M., Fahlevi, H., Indriani, M., & Syukur, M. (2024). Deciding to be ignored: Why accounting scholars use dubious quality research outlets in a neocolonial context. *Critical Perspectives on Accounting*, 99, 102740. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2024.102740>
- Doyle, W. (2018). *The Oxford history of the French revolution*. Oxford University Press.
- Hadisaputra, H. (2021). Etnografi Politik Muhammadiyah Sulawesi Selatan dalam Pemilu 2019. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 7(3), 328–343. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v7i3.1311>
- Kashwan, P., MacLean, L. M., & García-López, G. A. (2019). Rethinking power and institutions in the shadows of neoliberalism:(An introduction to a special issue of World Development). *World Development*, 120, 133–146. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.05.026>
- Khasanah, F. (n.d.). *Etika Gus Dur: Religius-Rasional*.
- Nadirah, S. P., Pramana, A. D. R., & Zari, N. (2022). *metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, mix method (mengelola Penelitian Dengan Mendeley dan Nvivo)*. CV.

Azka Pustaka.

- Naufal, M. F. (2017). *Hubungan Agama Dan Negara Dalam Pemikiran Politik Islam Di Indonesia (Analisis Pemikiran Politik Bahtiar Effendy)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Putera, R. P. (2018). Pemikiran Politik Islam Di Indonesia: Dari Formalistik Menuju Ke Substantif. *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 3(01), 57–68.
- Saly, J. N., Ramadhan, A. N., Mandry, F. V., Saputra, J. N., Abror, R. M., & Rabbani, R. R. (2023). Pembunuhan Mahasiswa Trisakti Saat Kerusuhan 1998 Sesuai Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Terkait Pelanggaran Sila Kedua Pancasila. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1(2), 131–136. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1252>
- Sari, M., Karim, Z. P., & Armia, M. S. (2023). Analisis Siyāsah Qadhā'iyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi. *JAPHTN-HAN*, 2(1), 37–62. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.56>
- Sujatnika, G., Khozi, A., & Satriya, C. A. (2024). Impeachment and Its Problem: The Study from Constitutional Law vs Criminal law Perspective in Indonesia. *Revista de Investigações Constitucionais*, 11(1), e257. <https://doi.org/10.5380/rinc.v11i1.87862>
- Suyono, J., & Sunaryo, S. (2024). *Buku Kasus Kepemimpinan Presiden Indonesia*. Penerbit Salemba.
- Swantoro, P. (2016). *Masalalu selalu aktual*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Tokatlı, M. (2024). Impeachment as last resort to safeguard democracy? Removing the head of government in different institutional settings. *Politische Vierteljahresschrift*, 65(2), 395–415. <https://doi.org/10.15548/h.v15i2.3650>
- Utama, V. R. (2021). *Menjerat Gus Dur: Konspirasi Penggulingan Gus Dur*. Numedia.
- Yola, N. (2021). Review Buku Menjerat Gus Dur. *Hadharah: Jurnal Keislaman Dan Peradaban*, 15(2), 119–131. <https://doi.org/10.15548/h.v15i2.3650>
- Yulianto, W., & Amalia, D. S. (2024). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Mimbar Integritas: Jurnal Pengabdian*, 3(1), 143–159. https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v7i2.4015



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).